

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Nias Barat

Abdi Gunawan Halawa¹⁾, Johnson Pasaribu²⁾, Artha Lumban Tobing³⁾,

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen
Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Email Korespondensi: abdi.halawa@student.uhn.ac.id
Email: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id
Email: artha.tobing@uhn.ac.id

Abstract: Poverty is a complex problem faced almost throughout the world, including Indonesia. West Nias Regency has a high poverty rate compared to other areas in North Sumatra, although the trend has shown a decline since 2015. This study aims to analyze innovations in local government policies in reducing poverty rates in West Nias Regency. With a qualitative-descriptive approach, this research explores policies in various sectors such as education, health, infrastructure, and community economic empowerment. The research results show that policy innovation based on inter-sector integration and an approach oriented towards local wisdom contribute to reducing poverty rates. However, challenges such as limited infrastructure, accessibility, and program sustainability still need to be addressed. Strategic recommendations are proposed to improve the effectiveness of policies in poverty alleviation in West Nias Regency.

Keywords: Policy Innovation, Poverty, Local Government, Regional Development, West Nias.

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kabupaten Nias Barat memiliki angka kemiskinan yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Sumatera Utara, meskipun tren menunjukkan penurunan sejak 2015. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Barat. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menggali kebijakan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan berbasis integrasi antar sektor serta pendekatan yang berorientasi pada kearifan lokal berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, dan keberlanjutan program masih perlu diatasi. Rekomendasi strategis diajukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nias Barat.

Kata kunci: Inovasi Kebijakan, Kemiskinan, Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah, Nias Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dengan prioritas utama mengurangi kemiskinan.

Kabupaten Nias Barat di Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2015, tingkat

kemiskinan mencapai 29,96% dan mengalami penurunan menjadi 22,68% pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi kebijakan yang efektif untuk mempercepat pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menerapkan berbagai kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Barat. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana inovasi kebijakan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam penurunan angka kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Landasan Teori

Inovasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Inovasi Kebijakan Publik

Kata inovasi sudah sering kita dengar dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan baik menyangkut individu, masyarakat, organisasi dan negara (Sururi, 2016). Inovasi dan kebijakan publik ibarat dua sisi dari keping mata uang yang sama. Inovasi berkontribusi dalam memberikan pengetahuan, pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kebijakan publik sedangkan kebijakan publik memberikan suplemen teori, pedoman dan metodologi yang dapat memperkuat inovasi kebijakan public (Sururi, 2016.).

2. Pengentasan Kemiskinan

Menurut PBB, kemiskinan adalah kondisi di mana individu tidak memiliki pilihan atau kesempatan untuk mengembangkan kemampuan hidup mereka. Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan terus-menerus dalam kesejahteraan hidup. Kurangnya pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan teknologi adalah hambatan bagi sumber daya manusia dan merupakan salah satu penyebab kemiskinan, selain hambatan struktural, institusional, dan sosial budaya (Setiawan & Jamaliah, 2023).

3. Relevansi Antara Inovasi Kebijakan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecah masalah masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung (Josef P, 2020). Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "negara harus menjaga fakir miskin dan anak terlantar," Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menurunkan jumlah

masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sejak zaman orde lama hingga saat ini (Setiawan & Jamaliah, 2023).

B. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Nias Barat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dengan fokus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) sebagai lembaga utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, antara lain:

1. Informan Kunci

Pejabat di bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Informan Utama

Pejabat dan staf di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data:

1. Data Primer

Wawancara mendalam dengan informan terkait kebijakan inovatif yang diterapkan dalam pengentasan kemiskinan dan Dokumentasi yang diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Nias Barat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan inovasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan.

E. Teknik Analisis Data

Creswell (2016) menguraikan enam langkah utama dalam analisis data kualitatif:

1. Mengumpulkan dan Mempersiapkan Data, Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan secara sistematis.
2. Membaca dan Memahami Data, Data ditinjau ulang untuk mengenali pola dan tema awal.
3. Memberikan Kode (Coding), Data dikategorikan berdasarkan tema tertentu untuk menemukan hubungan antar informasi.
4. Identifikasi Tema Utama, Tema yang muncul dari proses coding dikembangkan menjadi kategori utama penelitian.
5. Penyajian Data, Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau visual seperti tabel dan diagram.
6. Interpretasi dan Kesimpulan, Temuan dikaitkan dengan teori yang relevan, serta diambil kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Nias Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 97.251 jiwa pada tahun 2024, meningkat sekitar 1.917 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, rasio jenis kelamin penduduk adalah 94,92, yang berarti bahwa dalam setiap 100 perempuan terdapat sekitar 95 laki-laki. Jumlah penduduk ini tersebar di berbagai kecamatan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Mandrehe, yang memiliki populasi paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nias Barat mencapai 187 jiwa/km² pada tahun 2024, yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 183 jiwa/km². Kepadatan ini mencerminkan distribusi populasi yang masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di pusat kecamatan dan daerah dengan akses infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, beberapa daerah dengan medan geografis yang sulit dan aksesibilitas terbatas cenderung memiliki kepadatan yang lebih rendah.

Dari segi komposisi penduduk, Kabupaten Nias Barat masih didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) yang mencakup 63,74% dari total populasi, sedangkan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun) mencakup sekitar 36,26%.

Dependency Ratio di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2024 adalah 56,88%, yang berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 57 orang yang belum atau tidak lagi produktif. Angka ini menunjukkan adanya potensi bonus demografi, tetapi juga menandakan tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan layanan sosial bagi kelompok usia non-produktif.

Dengan kondisi demografi yang terus berkembang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Selain itu, upaya pemerataan pembangunan di berbagai kecamatan menjadi penting untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi penduduk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat (2024), mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Nias Barat masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan 67,99% penduduk bekerja di sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian, baik dalam bentuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Selain pertanian, sektor jasa menjadi lapangan pekerjaan terbesar kedua dengan 25,03% penduduk bekerja di bidang ini, yang mencakup pekerjaan di sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, dan layanan masyarakat. Sementara itu, sektor industri masih memiliki kontribusi yang lebih kecil, yaitu 6,98%, namun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan adanya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah tersebut.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, meskipun sektor pertanian masih mendominasi, tingkat kesejahteraan sebagian besar petani masih tergolong rendah karena bergantung pada hasil panen yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, akses pasar yang terbatas, serta minimnya penggunaan teknologi pertanian modern. Pendapatan dari sektor pertanian cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan

sektor jasa menunjukkan adanya pergeseran ekonomi yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk bekerja di sektor non-pertanian. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi faktor yang berkontribusi dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif di sektor ini. Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong inovasi dan investasi di bidang industri serta pariwisata sebagai strategi diversifikasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Nias Barat secara keseluruhan.

Akses pendidikan di Kabupaten Nias Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Barat (2024), tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SD mencapai 99,68%, tetapi menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD adalah 96,24%, sementara untuk SMP dan SMA masing-masing sebesar 79,87% dan 75,59%. Ini menunjukkan bahwa masih ada anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan secara penuh, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Faktor lain yang mempengaruhi adalah keterbatasan sarana pendidikan, seperti jumlah sekolah yang terbatas di beberapa wilayah terpencil, serta kurangnya tenaga pengajar di daerah tertentu. Meskipun jumlah guru mengalami peningkatan, distribusi yang tidak merata masih menjadi kendala dalam pemerataan akses pendidikan.

Di sektor kesehatan, layanan kesehatan di Kabupaten Nias Barat terus mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Pada tahun 2024, umur harapan hidup di Nias Barat meningkat menjadi 72,55 tahun, menunjukkan adanya perbaikan dalam standar kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat masalah kesehatan yang harus ditangani, seperti meningkatnya angka keluhan kesehatan (morbiditas) dari 15,06% pada tahun 2023 menjadi 18,33% pada tahun 2024. Persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan mencapai 89,43%, dengan mayoritas persalinan ditangani oleh bidan. Meskipun angka ini meningkat, masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun beranak,

yang dapat berdampak pada keselamatan ibu dan bayi. Dari segi pemanfaatan fasilitas kesehatan, mayoritas masyarakat lebih memilih praktek dokter/bidan (60,73%), diikuti oleh puskesmas/pustu (22,03%) dan rumah sakit pemerintah (3,51%).

Secara keseluruhan, meskipun akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di Kabupaten Nias Barat terus mengalami perbaikan, tantangan dalam keterjangkauan, pemerataan, serta kualitas layanan masih menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat, menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Barat di masa mendatang.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Nias Barat menunjukkan trend yang mengalami penurunan secara bertahap, meskipun masih berada pada angka yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Barat (2024), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 18.780 jiwa atau sekitar 22,81% dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tingkat kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 22,68%. Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemajuan dalam pengentasan kemiskinan masih berjalan lambat. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan Kabupaten Nias Barat bahkan mencapai 28,1%, yang menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan hanya turun sekitar 5,29%.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kemiskinan adalah berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sektor ekonomi lokal, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM). Meskipun demikian, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya infrastruktur, akses pasar yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Nias Barat yang terdiri dari daerah kepulauan turut mempersulit akses terhadap layanan sosial dan

ekonomi, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara, Kabupaten Nias Barat masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari Kabupaten Nias (21,46%) dan Kabupaten Nias Utara (20,35%), namun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Nias Selatan (23,12%). Di sisi lain, daerah perkotaan seperti Kota Medan (8,94%) dan Kota Pematangsiantar (7,32%) memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah karena didukung oleh perekonomian yang lebih maju dan infrastruktur yang lebih baik.

Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Barat dalam beberapa tahun terakhir, laju penurunannya masih relatif lambat dan membutuhkan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak. Diperlukan strategi yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat. Pemerintah daerah menerapkan 19 bidang kebijakan prioritas untuk pengentasan kemiskinan yang meliputi

Pada bidang Pendidikan Pemerintah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan membangun fasilitas sekolah serta mendukung pendidikan formal dan nonformal. Tingkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100%, sementara APM SD 97,13% dan SMP 98,71%. Angka putus sekolah sangat rendah, dan 91,77% penduduk melek huruf.

Bidang Kesehatan di Kabupaten Nias Barat fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Pemerintah melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan capaian 80% dan anggaran sebesar 11,3 miliar rupiah. Layanan kesehatan mencakup ibu hamil, bayi, balita, usia produktif, lansia, ODGJ, ODMK, dan penderita tuberkulosis dengan dukungan anggaran 19,77 miliar rupiah. Untuk meningkatkan efisiensi, diterapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dengan anggaran 30 juta rupiah. Seluruh program dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, dan memastikan pelayanan yang merata di Kabupaten Nias Barat.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Barat fokus pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses layanan dasar. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mencakup normalisasi sungai, irigasi sepanjang 3.224 meter, dan pengamanan pantai dengan anggaran 4,35 miliar rupiah. Untuk akses air bersih, Program SPAM mencakup jaringan air minum yang melayani 21,40% penduduk dengan anggaran 3,38 miliar rupiah. Pengelolaan sampah didukung anggaran 4 miliar rupiah, sementara sistem drainase dengan panjang minimal 1,5 meter mendapat anggaran 1 miliar rupiah. Program Pengembangan Permukiman meliputi pembangunan 6 unit TPA dan TPS dengan anggaran 200 juta rupiah. Penyelenggaraan Jalan mencakup perbaikan 23,24% jalan kabupaten dengan anggaran 98,09 miliar rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Nias Barat.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sebanyak 26 rumah tidak layak huni diperbaiki, serta 6 unit TPA/TPS dibangun untuk mendukung pengelolaan sampah dan permukiman yang lebih baik.

Bidang Sosial di Kabupaten Nias Barat berfokus pada penurunan beban pengeluaran masyarakat melalui Program Rehabilitasi Sosial yang menasar 180 jiwa, 7663 KPM, dan 19 jiwa lainnya. Program ini memberikan bantuan alat bantu, layanan data, pengaduan, dan pemenuhan kebutuhan permukiman sesuai standar gizi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mengelola data fakir miskin untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran, termasuk penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan pengembangan kelompok usaha bersama, dengan 21.248 keluarga sebagai penerima manfaat. Untuk kesiapsiagaan bencana, Program Penanganan Bencana memberikan perlindungan sosial bagi korban,

termasuk bantuan permakanan bagi 150 orang selama masa tanggap darurat. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Sosial dengan dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan perlindungan sosial yang efektif, dan menciptakan lingkungan inklusif bagi kelompok rentan dan terdampak bencana di Nias Barat.

Bidang Tenaga Kerja, Sebanyak 15 tenaga kerja mendapatkan pelatihan keterampilan, sementara 300 tenaga kerja diberdayakan dengan anggaran 3,3 miliar rupiah.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Nias Barat fokus pada pemberdayaan koperasi dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mendukung 15 unit usaha produktif dengan anggaran 71,2 juta rupiah melalui peningkatan akses pasar, pembiayaan, serta penguatan kelembagaan. Program Pengembangan UMKM bertujuan meningkatkan skala usaha mikro menjadi kecil, dengan 50 unit usaha menerima fasilitas produksi, pengolahan, dan pemasaran serta anggaran 128,9 juta rupiah. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian melatih 50 anggota koperasi dengan anggaran 150 juta rupiah. Program Pemberdayaan UMKM melibatkan pendataan, kemitraan, dan kemudahan perizinan, mendukung 103 unit usaha dengan anggaran 70,1 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Nias Barat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias Barat fokus pada pengurangan kemiskinan dan penguatan lembaga masyarakat dalam pembangunan desa. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga seperti RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, serta penguatan lembaga adat. Sebanyak 105 lembaga telah menerima pendampingan dan peningkatan kapasitas dengan anggaran 200 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk

memperkuat partisipasi masyarakat, mendorong pembangunan desa berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Barat berfokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) mendukung 37 kampung keluarga berkualitas dengan anggaran 582,5 juta rupiah untuk memperkuat pembangunan keluarga dan kependudukan. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) menyediakan 30 unit sarana untuk kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan anggaran 360 juta rupiah. Sebanyak 315 kader menerima dukungan operasional dengan anggaran 1,95 miliar rupiah untuk meningkatkan efektivitas program. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3KB) untuk memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memastikan akses layanan keluarga berencana yang lebih baik di Nias Barat.

Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi. Program Pelayanan Penanaman Modal mempermudah perizinan usaha berbasis risiko secara elektronik, melayani satu pelaku usaha dengan anggaran 500 ribu rupiah, serta menyediakan layanan konsultasi perizinan dengan anggaran 1 juta rupiah. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengawasi 124 pelaku usaha dan 857 kegiatan usaha dengan anggaran 532,1 juta rupiah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi investasi. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah berusaha, meningkatkan investasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di Nias Barat.

Bidang Perpustakaan di Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan literasi dan pengurangan kemiskinan melalui pengembangan perpustakaan dan budaya membaca. Program Pembinaan Perpustakaan

membangun satu perpustakaan baru dengan anggaran 126 juta rupiah untuk mendorong kebiasaan membaca. Program Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial mengembangkan lima perpustakaan inklusif dengan anggaran 580,7 juta rupiah untuk meningkatkan akses informasi dan pendidikan bagi masyarakat. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memperluas akses bahan bacaan, meningkatkan literasi, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di Nias Barat.

Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan daya saing olahraga dan pengurangan kemiskinan melalui pengembangan sarana dan pembinaan atlet. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan membangun satu unit sarana olahraga dengan anggaran 450 juta rupiah. Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah diselenggarakan dengan anggaran 1,5 miliar rupiah, mencakup perencanaan kejuaraan multi-event dan single-event. Selain itu, dua atlet mendapat dukungan 150 juta rupiah untuk berpartisipasi dalam kejuaraan. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DISPARBUDPORA) untuk meningkatkan pembinaan olahraga, memperluas akses fasilitas, dan mencetak atlet berprestasi di Nias Barat.

Bidang Kebudayaan di Kabupaten Nias Barat fokus pada pelestarian budaya dan pengurangan kemiskinan melalui berbagai program. Program Pengembangan Kebudayaan melindungi dan mengembangkan dua objek budaya dengan anggaran 200 juta rupiah. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan melatih 100 pelaku budaya dengan anggaran 340 juta rupiah. Program Pengembangan Kesenian Tradisional memberikan pembinaan kepada satu lembaga kesenian tradisional dengan dukungan 300 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DISPARBUDPORA) untuk memperkuat identitas budaya lokal, memberdayakan pelaku seni, dan melestarikan warisan budaya di Nias Barat.

Bidang Pariwisata di Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan daya tarik wisata dan sektor ekonomi kreatif untuk mengurangi

kemiskinan dan meningkatkan pendapatan daerah. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata menyediakan 9 unit sarana dengan anggaran 1,15 juta rupiah dan menerapkan konsep wisata berkelanjutan di 16 lokasi dengan anggaran 197,8 juta rupiah. Program Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata memberikan sertifikasi kepada 10 unit usaha dengan anggaran 505 ribu rupiah. Program Pemasaran Pariwisata mencakup penyebaran informasi wisata dengan anggaran 5 juta rupiah dan kerja sama dalam dan luar negeri dengan anggaran 55,9 juta rupiah. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata melaksanakan tiga kegiatan pemasaran dengan anggaran 131,1 juta rupiah, serta promosi melalui media dengan anggaran 8 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DISPARBUDPORA) untuk meningkatkan daya saing pariwisata, jumlah wisatawan, dan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Nias Barat.

Bidang Pangan di Kabupaten Nias Barat berfokus pada penurunan beban pengeluaran dan peningkatan ketahanan pangan melalui berbagai program. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat menyalurkan delapan jenis pangan pokok dengan anggaran 300 ribu rupiah dan mencapai target konsumsi pangan per kapita 100%. Program Penanganan Kerawanan Pangan mencakup penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan anggaran 150 ribu rupiah dan pengelolaan cadangan pangan untuk mengatasi kekurangan pangan di tingkat kabupaten/kota, didukung oleh dokumen kajian dengan anggaran 150 ribu rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Nias Barat.

Bidang Pertanian di Kabupaten Nias Barat fokus pada peningkatan pendapatan dan produktivitas petani melalui berbagai program. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengawasi penggunaan sarana pertanian sesuai spesifik lokasi dengan anggaran 375 juta rupiah, serta melakukan pendampingan dan pengawasan mutu benih dan bibit ternak dengan anggaran 81,6 juta dan 150

ribu rupiah. Sebanyak 100 ekor bibit ternak telah bersertifikat, sementara 500 ekor lainnya berasal dari daerah lain. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian memperbaiki satu unit jalan usaha tani dengan anggaran 150 ribu rupiah dan membangun delapan unit balai penyuluhan dengan anggaran 150 ribu rupiah. Program Pengendalian Kesehatan Hewan menangani penyakit hewan menular dengan anggaran 150 ribu rupiah. Program Penyuluhan Pertanian meningkatkan kapasitas delapan unit kelembagaan penyuluhan dengan anggaran 92 juta rupiah dan memperkuat satu unit kelembagaan petani dengan anggaran 50 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Nias Barat.

Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui pengembangan sektor perikanan. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap menyediakan lima unit prasarana dengan anggaran 150 ribu rupiah dan meningkatkan kapasitas 15 nelayan kecil dengan anggaran 230 juta rupiah. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya mendukung 15 kelompok pembudi daya ikan kecil melalui pendampingan dan pelatihan dengan anggaran 238 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Nias Barat.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat berfokus pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan UMKM melalui berbagai program di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam sektor perdagangan, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan bertujuan mempermudah penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan usaha toko swalayan, dengan capaian penerbitan izin mencapai 80% serta anggaran sebesar 100 ribu rupiah. Selain itu, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan mencakup pembangunan dan pengelolaan tiga unit sarana

distribusi serta penerbitan lima dokumen hasil pembinaan, didukung oleh anggaran sebesar 250 ribu rupiah. Untuk memperkuat daya saing produk lokal, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri memberikan fasilitasi promosi bagi lima UMKM dengan anggaran 300 ribu rupiah. Sementara itu, dalam bidang perindustrian, pemerintah melaksanakan Program Pengendalian Izin Usaha Industri untuk memperkuat pengelolaan izin industri melalui verifikasi pemenuhan standar usaha berbasis risiko menggunakan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Sebanyak lima dokumen laporan verifikasi izin industri telah diterbitkan dengan dukungan anggaran sebesar 3,5 juta rupiah. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing UMKM, serta memastikan legalitas dan pengembangan usaha di sektor perdagangan dan industri di Kabupaten Nias Barat.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat berfokus pada pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program. Program Pengendalian Penduduk bertujuan memetakan dan merencanakan pengelolaan kependudukan di tingkat kabupaten/kota, menghasilkan sebuah laporan parameter kependudukan dengan anggaran 48 juta rupiah. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai keluarga berencana, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memberikan advokasi, informasi, dan edukasi berbasis kearifan lokal kepada 866 orang dengan anggaran 866 juta rupiah, serta memberdayakan tenaga penyuluh KB dengan anggaran 615 juta rupiah. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) menyediakan 30 unit sarana kegiatan untuk Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), serta mendukung usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) dengan anggaran 360 juta rupiah. Selain itu, 315 kader pengelola menerima biaya operasional dengan anggaran 1,95 miliar rupiah untuk memperlancar pelaksanaan program. Seluruh program ini dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (P3AKB) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga di Kabupaten Nias Barat.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menerapkan berbagai kebijakan inovatif di 19 sektor sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan, seperti pencapaian program, realisasi anggaran, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah program Penyelenggaraan Jalan, yang telah memperbaiki 23,24% jalan kabupaten, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Selain itu, Program Pengelolaan Pendidikan berhasil mencapai 100% tingkat kelulusan SD dan SMP, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Penyediaan air minum layak, yang kini mencakup 21,40% penduduk, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Secara keseluruhan, kebijakan yang telah dijalankan menunjukkan progres yang baik, meskipun masih ada tantangan dalam memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.

Dampak kebijakan ini terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Barat tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar serta bertambahnya pendapatan kelompok rentan. Misalnya, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan pembangunan 3.224 meter jaringan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat desa. Program Perlindungan Sosial, yang menyediakan bantuan permakanan bagi 7.663 keluarga penerima manfaat, juga berhasil meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Di sektor ketenagakerjaan, program pelatihan dan penempatan tenaga kerja telah meningkatkan keterampilan 300 tenaga kerja, membuka peluang kerja yang lebih luas, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif, efektivitasnya masih perlu diperkuat dengan strategi berkelanjutan. Upaya seperti peningkatan investasi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi kreatif perlu dikembangkan agar masyarakat dapat mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang telah diterapkan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi ini memiliki kesamaan dengan beberapa daerah lain, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi.

Di Kabupaten Banyuwangi, program Smart Kampung (Ardiyasa & Rahayu, 2022) mengintegrasikan teknologi dalam layanan publik dan ekonomi desa, mempercepat akses masyarakat terhadap informasi dan layanan dasar. Sementara itu, Nias Barat lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan 23,24% jalan kabupaten dan penyediaan air minum layak bagi 21,40% penduduk. Meskipun kurang berbasis digital, pendekatan ini tetap efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam bidang perlindungan sosial, Provinsi Jawa Barat menerapkan Program Kredit Mesra (Lestari et al., 2023), yang memberikan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan UMKM. Ini mendorong kemandirian ekonomi dibandingkan bantuan sosial langsung di Nias Barat, seperti bantuan permakanan untuk 7.663 keluarga dan pelatihan keterampilan bagi 300 tenaga kerja. Pendekatan Jawa Barat lebih berkelanjutan dibandingkan strategi Nias Barat yang masih bersifat jangka pendek.

Di sektor pemberdayaan ekonomi, Kabupaten Kulon Progo menjalankan program Bela dan Beli Kulon Progo (Puspitasari & Mahendra, 2020), yang mendukung konsumsi produk lokal dan memperluas pasar bagi pengusaha kecil. Sementara Nias Barat juga memiliki program pengembangan UMKM,

upaya masih terbatas pada pelatihan dan modal awal, tanpa dukungan kuat dari pemerintah dalam pemasaran produk lokal.

Jika dibandingkan dengan Kota Bima, kebijakan Nias Barat masih konvensional dan berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan Kota Bima mengutamakan digitalisasi, inklusi keuangan, dan pendekatan multi-sektoral (Inovasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Bima, 2023). Digitalisasi layanan publik dan akses kredit usaha mikro di Kota Bima telah mempercepat pemberdayaan masyarakat miskin, sesuatu yang belum menjadi prioritas di Nias Barat.

Meskipun kebijakan di Nias Barat telah memberikan dampak positif, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam inovasi berbasis digital, inklusi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, seperti integrasi teknologi dalam layanan publik, pembentukan forum kerja multi-sektoral, dan penyediaan akses kredit mikro, Nias Barat dapat meningkatkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinannya untuk dampak jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nias Barat masih mengandalkan pendekatan konvensional, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial langsung. Menurut Rogers (2007) dalam *Diffusion of Innovations*, inovasi kebijakan terjadi ketika pemerintah menerapkan solusi baru yang lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas. Namun, dibandingkan dengan Kota Bima dan Banyuwangi yang telah mengadopsi digitalisasi layanan publik dan pendekatan multi-sektoral, kebijakan di Nias Barat masih belum memanfaatkan inovasi berbasis teknologi secara optimal.

Dari perspektif administrasi publik, *New Public Management (NPM)* oleh Hood (1991) menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan koordinasi lintas sektor dalam kebijakan publik. Di Nias Barat, kebijakan pengentasan kemiskinan masih berjalan secara sektoral tanpa integrasi yang kuat antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berbeda dengan Kota Bima yang menerapkan kebijakan multi-sektoral, Nias Barat masih memerlukan peningkatan *good governance*, terutama dalam

efisiensi birokrasi dan keterlibatan aktor non-pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program.

Dari sudut pandang kebijakan sosial, Titmuss (1974) menekankan bahwa kebijakan sosial harus mencakup redistribusi sumber daya, intervensi berbasis kebutuhan, dan jaminan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan di Nias Barat masih cenderung berbasis bantuan sosial jangka pendek, seperti bantuan permakanaan untuk 7.663 keluarga dan pelatihan keterampilan bagi 300 tenaga kerja, tanpa strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Sebaliknya, Program Kredit Mesra di Jawa Barat (Lestari et al., 2023) lebih sejalan dengan teori kebijakan sosial karena memberikan akses permodalan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha mereka sendiri.

Menurut Christensen (2019) dalam *The Prosperity Paradox*, inovasi dalam kebijakan tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. OECD (2020) dalam *Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)* menekankan pentingnya *innovation lifecycle*, di mana kebijakan harus terus dievaluasi dan dikembangkan agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan ekonomi. Kabupaten Nias Barat masih perlu menerapkan strategi inovasi berkelanjutan dengan memperkuat inklusi keuangan, kemitraan swasta, dan pemberdayaan UMKM.

Secara keseluruhan, berdasarkan Model Inovasi Pengentasan Kemiskinan dari Kementerian PANRB (2023), strategi yang efektif harus mencakup perbaikan data, bantuan sosial, akses ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi. Kabupaten Nias Barat telah menerapkan beberapa aspek ini, tetapi masih berfokus pada bantuan sosial jangka pendek tanpa strategi jangka panjang yang jelas. Oleh karena itu, agar lebih efektif, kebijakan pengentasan kemiskinan di Nias Barat harus bertransformasi ke arah yang lebih inovatif, dengan pemanfaatan teknologi digital, integrasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nias Barat masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi dalam skala kecil. Meskipun program-program ini berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas umum, efektivitasnya masih terbatas. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah masih cukup tinggi, sementara peluang kerja serta akses terhadap sumber daya ekonomi masih terbatas, terutama di daerah terpencil.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nias Barat meliputi infrastruktur yang belum merata, rendahnya literasi keuangan, kurangnya keterampilan berbasis teknologi, serta minimnya integrasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Nias Barat sebagai wilayah kepulauan turut menjadi hambatan dalam distribusi ekonomi dan akses layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang lebih adaptif, berbasis teknologi digital, dan berorientasi pada penciptaan peluang ekonomi jangka panjang. Dengan pendekatan yang lebih inovatif, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif dan inklusif, memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Nias Barat.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu mengadopsi kebijakan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial harus diterapkan guna memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan program sosial. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemberdayaan UMKM dan koperasi berbasis digital melalui pelatihan kewirausahaan, akses pemasaran daring, serta pemanfaatan layanan keuangan berbasis fintech agar pelaku usaha

kecil dapat mengembangkan bisnis mereka secara lebih mandiri dan kompetitif.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan masyarakat perlu didorong dengan mengembangkan sektor ekonomi alternatif, seperti industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam sektor-sektor produktif ini, lapangan kerja baru dapat tercipta dan ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat berkurang. Keempat, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah perlu diperkuat untuk membantu menyediakan akses modal, pelatihan keterampilan, serta penguatan jaringan pemasaran bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public administration*, 69(1), 3-19.
- Ardiyasa, G. G., & Rahayu, E. (2022). Implementasi Kebijakan Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 712-728.
- Christensen, CM, Ojomo, E., & Dillon, K. (2019). Paradoks kemakmuran: Bagaimana inovasi dapat mengangkat bangsa keluar dari kemiskinan. (*Tanpa Judul*).
- DPutri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(9).
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2409-2418.
- Dharmawan, L., Firmansyah, A., & Susanto, T. (2019). Komunikasi inovasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan komunitas petani untuk mewujudkan kemandirian pangan di era digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 55-68.
- Mavrozacharakis, E. (2018). Negara kesejahteraan modern dan demokrasi sosial: saling ketergantungan dan pentingnya kebijakan. *Jurnal Perpustakaan Akses Terbuka*, 5 (03), 1.
- Nurfahaty, N., Wahyuli, S., & Wardani, M. (2023). Inovasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran Dari Praktik Kebijakan Di Kota Bima. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5 (2), 315-324.
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209-3218.

- Lestari, M. N., Toto, T., Kartika, R., & Tinia, A. G. (2023). Penyaluran Kredit MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) Pada Usaha Mikro. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2866-2873.
- Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 80-88.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Ikandar, A.P. (2023) Model Inovasi Pengentasan Kemiskinan_Ok Jipnas. (N.D.-A).
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 56-68. 1.